

BAB II

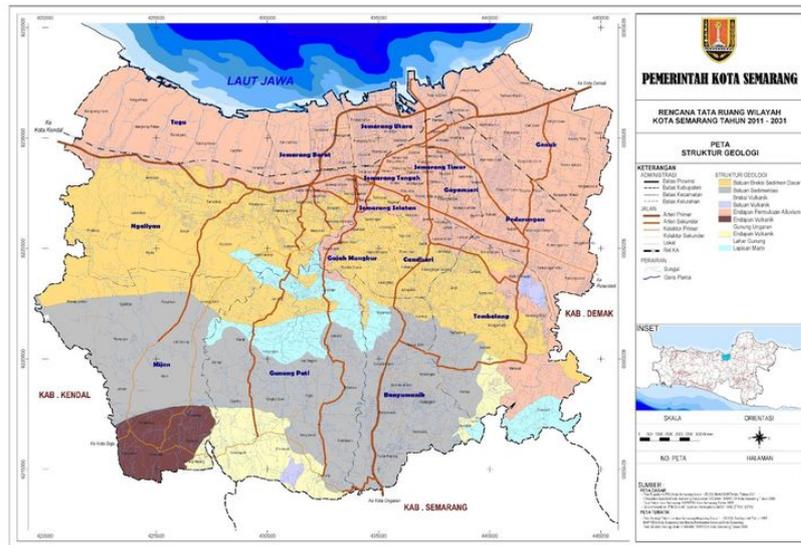
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Seluruh informasi terkait penelitian ini merupakan objek dari penelitian ini yang dimana uraiannya berkaitan terhadap gambaran umum Kota Semarang yang menjelaskan tentang kondisi geografis dan demografi yang meliputi luas wilayah di Kota Semarang dan gambaran umum instansi terkait sebuah Visi - Misi, Tugas pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi. Instansi yang dicantumkan ialah Dinas Sosial Kota Semarang dan Kecamatan Gayamsari.

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Sejak 2 Mei 1547, Semarang telah berdiri dan kemudian menjadi Ibu Kota dari provinsi Jawa Tengah. Dengan luas wilayah sebesar 373,70 km² memiliki 16 kecamatan serta 117 kelurahan, Semarang didominasi oleh penduduk yang sangat beraneka ragam. Banyak sekali suku, agama, etnis, dan budaya yang masuk dan berdomisili di Semarang. Selain itu, Semarang dinilai menjadi sebuah kota metropolitan apabila ditinjau dari lengkapnya seluruh fasilitas yang tersedia di Semarang. Hal ini juga menyebabkan tingginya tingkat urbanisasi di Semarang sehingga Semarang termasuk ke dalam kawasan padat penduduk. Dengan lengkapnya fasilitas yang tersedia di Semarang, para masyarakat dari daerah lain mengadu nasibnya di Semarang, akan tetapi semakin banyaknya manusia yang bermukim di suatu wilayah tentu akan memperbesar persaingan. Hal ini menyebabkan sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan di Semarang yang mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan yang melanda Semarang.

Apabila dilustrasikan ke dalam sebuah peta, Semarang dapat dilihat seperti gambar berikut ini :



Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang

Sumber : Peta HD

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Secara geografis, Semarang terletak di antara $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur di mana lokasi ini dinilai merupakan lokasi yang strategis. Berikut adalah batas wilayah dari Kota Semarang :

- a) Batas Utara : Laut Jawa
- b) Batas Selatan :Kabupaten Semarang
- c) Batas Timur :Kabupaten Demak
- d) Batas Barat : Kabupaten Kendal

Dengan rentang suhu udara di mulai dari 20° - 30° Celcius beserta rerata suhu berada di kisar 27° Celcius, Semarang terlihat bahwa didominasi oleh daerah yang berbukir, daerah dataran rendah, dan pantai.

2.1.2 Kependudukan

Dengan berbatasan langsung denan pantai, Kota Semarang dinilai sebagai salah satu kota yang berpenduduk heterogen di Jawa Tengah. Selain itu, Kota Semarang merupakan kota yang padat, yang dibuktikan dengan data yang diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Semarang pada tahun 2019 yaitu sejumlah 1.814.110 jiwa masyarakat yang berdomisili di Semarang. Hal ini membuktikan bahwa dewasa ini, Semarang telah mengalami fluktuasi.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk di Kota Semarang 2018 - 2019

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1.	2018	1.668.578
2.	2019	1.674.358
3.	2020	1.653.524
4.	2021	1.656.564
5.	2022	1.659.975

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Berdasarkan data tersebut, dipaparkan bahwa Semarang telah mengalami kenaikan serta penurunan jumlah penduduk di setiap tahunnya, akan tetapi angka tersebut masih cenderung stabil. Faktanya, kepadatan penduduk di Semarang tidaklah merata, daerah kota lebih mendominasi apabila dibandingkan dengan daerah pedesaan. Hal ini dikemukakan olehh Joko Santoso selaku Ketua Pansus Raperda Kecamatan DPRD Kota Semarang saat ditemui usah memimpin sebuah pertemuan dengan Panitia Khusus (Pansus) mengenai pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kecamatan di Kota Semarang, baliu mengatakan bahwa “Bahwa masih banyak kelurahan di Kota Semarang yang belum sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Dapat dilihat bahwa ada keluarahan yang penduduknya sangat padat, akan tetapi ada pula yang penduduknya sedikit?” (Wibisono, Lanang. "Kepadatan Penduduk di Kota Semarang Tidak Merata, Dewan Inisiasi Perda Baru". Halosemarang.id. <https://halosemarang.id/kepadatan-penduduk-di-kota-semarang-tidak-merata-dewan-inisiasi-perda-baru>. Diakses 4 Januari 2021). Hal ini dapat dilihat melalui tabel di bawah :

Tabel 2. 1 Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki - Laki	Perempuan	
1.	Semarang Tengah	27,840	30,120	57,960
2.	Semarang Utara	58,941	60,380	119,321
3.	Semarang Timur	34,087	35,972	70,059
4.	Gayamsari	35,889	36,647	72,536

5.	Genuk	62,516	61,118	124,634
6.	Pedurungan	97,125	99,457	97,668
7.	Semarang Selatan	32,474	34,159	66,633
8.	Candisari	38,481	39,647	78,128
9.	Gajahmungkur	28,648	29,581	58,229
10.	Tembalang	94,455	95,234	189,689
11.	Banyumanik	71,043	73,910	143,953
12.	Gunungpati	49,606	49,751	99,357
13.	Semarang Barat	75,964	78,387	154,351
14.	Mijen	39,946	40,079	80,025
15.	Ngaliyan	71,086	71,759	142,845
16.	Tugu	17,110	17,026	34,136
Total		835,754	853,227	1,688,981

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Data tersebut sudah jelas memaparkan bahwa tidak semua kecamatan di Semarang memiliki kepadatan penduduk yang seimbang. Sehingga terjadi sebuah tumpeng tindih Ketika mendapatkan bantuan – bantuan program pemerintah termasuk PKH.

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Gayamsari

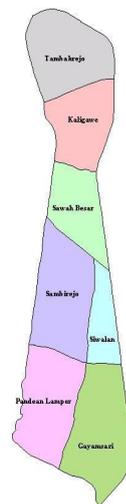
Kecamatan Gayamsari memiliki luas wilayah 526,33 hektar yang terletak \pm 5 kilometer disebelah timur pusat Kota Semarang dengan ketinggian 3,4 meter dari permukaan air laut. Sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kota Semarang yang berdasarkan

pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 1999 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang*, Kecamatan Gayamsari termasuk sebagai Bagian Wilayah Kota (BWK) V yang pemanfaatannya sebagai pemukiman campuran (perdagangan dan jasa perkantoran) serta agrobasis industri. Sehingga merupakan salah satu pendukung utama aktivitas perekonomian Kota Semarang.

2.2.1 Batas Kecamatan Gayamsari

- Sebelah Utara : Kecamatan Genuk
- Sebelah Selatan : Kecamatan Semarang Selatan
- Sebelah Timur : Kecamatan Pedurungan
- Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Timur

Kondisi geografis Kecamatan Gayamsari dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini :



Gambar 2. 2 Kecamatan Gayamsari

Sumber : BPS Kota Semarang

2.2.2 Jumlah Penduduk / Demografi Kecamatan Gayamsari

Kecamatan Gayamsari memiliki penduduk yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kecamatan lain di Kota Semarang. Jumlah penduduk antara Laki - laki dan Perempuan juga hampir seimbang. Dengan total penduduk ada 78.863 jiwa, Laki - laki di Kecamatan Gayamsari berjumlah 39.418 jiwa dan Perempuan di Kecamatan Gayamsari berjumlah 39.445 jiwa. (Juni 2018)

Dalam melaksanakan pembangunan, penduduk sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai faktor dominan dan tidak hanya sebagai pelaksana namun juga menjadi sasaran dari pembangunan. Pengembangan kualitas penduduk sebagai sumber daya manusia dilaksanakan melalui perbaikan mobilitas penduduk yang dititik beratkan pada penyebaran penduduk yang optimal dan merata.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk Kecamatan Gayamsari sampai dengan Desember 2021 adalah 77.903 jiwa terdiri dari 38.973 laki – laki (50,02%) dan 38.930 perempuan (49,98%) yang berarti mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kecamatan Gayamsari terdiri dari 447 RT dan 63 RW yang terhimpun dalam 25.453 Kepala Keluarga.

2.2.3 Daftar Kelurahan di Kecamatan Gayamsari

Gambar 2. 3 Jumlah Penduduk Kecamatan Gayamsari

Kelurahan	Jumlah Penduduk		
	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
Tambakrejo	4.836	4.978	9.812
Kaligawe	5.198	5.207	10.405
Sawah Besar	4.601	4.591	9.192
Siwalan	4.080	4.076	8.156
Sambirejo	4.137	4.208	8.345
Pandean Lamper	7.174	7.474	14.648
Gayamsari	6.162	6.250	12.412
Jumlah	36.188	36.784	72.970

Data tersebut mengilustrasikan bahwa persebaran penduduk di Kecamatan Gayamsari sangatlah signifikan perbedaannya. Ada beberapa kelurahan yang memiliki kepadatan yang tinggi dan beberapa lainnya memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Hal ini cukup membuktikan bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan Gayamsari tidak tersebar secara merata.

2.3 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial Kota Semarang merupakan satu kesatuan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga atau disingkat dengan Dinsospora. Semenjak tahun 2016 berganti menjadi

Dinas Sosial yang merupakan sebuah Lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam melayani masyarakat di sektor social kemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang. Dinas Sosial Kota Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang secara langsung akan bertanggung jawab terhadap Walikota serta memperoleh sebuah pembinaan dari Sekretariat Daerah perihal teknis administratif.

2.3.1 Visi dan Misi

Sebuah Lembaga, baik dari Lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan, tentunya memiliki visi dan misi masing – masing. Visi dan misi Dinas Sosial Kota Semarang tersusun ke dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang.

A. Visi

Visi dari Dinas Sosial Kota Semarang yaitu :

1. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
3. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
4. Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial

B. Misi

Misi dari Dinas Sosial Kota Semarang yaitu :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Tri Sakti Bung Karno-berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
3. Mewujudkan penyelenggaraan dinas sosial yang bersih, jujur dan transparan;
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk penuhi kebutuhan dasar masyarakat;
7. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan Jateng yg berkelanjutan & ramah lingkungan.

2.3.2 Tugas, Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang, kedudukan Dinas Sosial Kota Semarang adalah merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang

berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang dirincikan sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin
- b. Menyusun rancangan strategis yang selaras terhadap visi misi Walikota
- c. Mengkoordinasikan tugas yang dibebankan dengan tujuan untuk merealisasikan program yang telah dibebankan.
- d. Menyelenggarakan sebuah kegiatan untuk membina para elemen di bawahnya yang masih menjadi tanggung jawab Dinas Sosial.
- e. Menyusun sasaran dari kerja pegawai.
- f. Menyelenggarakan kerja sama dari bidang yang diampu.
- g. Menyelenggarakan kesekretariatan Dinas Sosial,;
- h. Menyelenggarakan program beserta seluruh aktivitas dalam bidang sosial.
- i. Menilai kinerja dari para pegawai.
- j. Mengawasi serta mengevaluasi seluruh program dan kegiatan yang telah terlaksana.
- k. Membuat sebuah laporan dari kegiatan pelaksanaan program.
- l. Menjalankan fungsi lain yang dibebankan oleh Walikota dan mash menjadi lingkup dari tanggung jawabnya.

2.3.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dijabarkan dalam bentuk gambar di bawah ini :

Gambar 2.3

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Semarang



Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang

Bagan Struktur tersebut menggambarkan terkait Dinas Sosial Kota Semarang yang terbagi menjadi 4 bidang yang setiap bidangnya dikepalai oleh seorang pemimpin. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang efektivitas serta efisiensi kerja. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan bidang yang menangani terkait implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gayamsari.

2.3.4 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Perlindungan

Sosial Korban Bencana Alam, Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dan Seksi Jaminan Sosial Keluarga. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dibagi 3 Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang terdiri dari seksi penanganan fakir miskin daerah rentan, seksi penanganan fakir miskin perkotaan, seksi pengolahan data kemiskinan.

A. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Mendata dan mengelola Sistem Informasi Warga Miskin;
- b. Memfasilitasi segala kebutuhan masyarakat guna mensejahterakan masyarakat;
- c. Mengelola dan menghimpun bantuan yang bersumber dari iuran;
- d. Mengelola data yang dicantumkan ke dalam Kartu Jaminan Sosial
- e. Kesejahteraan Warga Miskin; dan
- f. Menyusun data serta menginformasikannya ke Seksi Pengolahan Data Kemiskinan

2.4 Program Keluarga Harapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Program keluarga harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Kriteria KPM PKH terdiri dari penduduk miskin yang memenuhi persyaratan berdasar pada aspek kesehatan, pendidikan, lansia, dan kesejahteraan sosial. PKH memiliki tujuan, diantaranya :

- a) Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Program keluarga harapan memiliki beberapa komponen yang harus dipenuhi oleh KPM, diantaranya :

1. Kriteria komponen kesehatan meliputi :
 - a. ibu hamil/menyusui; dan
 - b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan meliputi :
 - a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - b. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
 - c. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang
 - a. belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi :
 - a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan

- b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

2.4.1 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Kajian Program Keluarga Harapan, 2015) Tujuan utama dari PKH ini adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

Tujuan ini Berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). Selain hal tersebut, masih terdapat beberapa tujuan lain dari PKH ini baik secara khusus maupun secara umum. Tujuan khusus PKH, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas kesehatan KPM
- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KPM
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak KPM

Tujuan umum PKH, yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.